

## DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta Erlangga.

Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. PT Indeks.

Hariadi, P, Restianto, Y. & Bawono, I, 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta Salemba Empat.

Hasfi, Nyemas. 2013. *Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang )*. Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. *Jurnal Tesis PMIS UNTAN PSIAN* Vol.1, No 0001.

Langelo, Friska. 2015. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah di Kota Bitung*. *Jurnal EMBA* Vol. 3 No. 1 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6556/6080>. Diakses 30 April 2017. Hal. 1-8.

Manangkalangi, Kurniawan. 2013. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. 3 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1936/1533>. Diakses 30 April 2017. Hal. 22-31

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta . ANDI.

Mentu, Ezra Paula dan Jullie J. Sondakh, 2016 , *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas pendapatan daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut* , *Jurnal EMBA* Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 1392-1399, <https://media.neliti.com/media/publications/3009-ID-penyajian-laporan-keuangan-daerah-sesuai-peraturan-pemerintah-no71-tahun-2010>, diakses 30 April 2017

Novianti, Eveliyn , 2016, *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten gunung kidul tahun 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Study Kasus di Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul*. Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.

Priyono, Karnanto. 2013. *Keandalan Informasi Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual ; Kajian Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Sampang*. UIN Malang. Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 1 E-ISSN : 2442-8922

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*

Rintiani, Wasik Nista. 2014. Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Jurnal Akuntansi Vol. 3 No. 1 <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/11232>. Diakses 30 April 2017. Hal. 1-18.

Rorimpandey Ariel, Grace B. Nangoy dan Hendrik Manossoh, 2016, *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan*, ejournal Unsrat Vol.5, No.2 2016 : 83-100.

Rosjidi, 2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah : Kerangka, Standar dan Metode*. Surabaya. Aksara Satu.

Sekaran, Uma. 2006. *Reseach Methods for Bussiness*. Buku 2. Jakarta. Salemba Empat.

Sinaga, Jamason, 2017, *Kondisi Pencatatan Aset tetap yang dialihkan sehubungan dengan penyerahan kewenangan Pemerintah kabupaten/kota kepada Provinsi, KSAP*.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ, 2015, *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan UU.2 /Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .*

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ. 2015, *Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintahan Berdasarkan UU 23/ Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Subagya. 1995. Manajemen Logistik. Jakarta. PT. Gunung Agung.

Sujarweni, V.Wiratna, 2015, Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.

Sulaiman dan Abdullah, 2016. Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua. JAFFA Vol.4, No.2, Oktober 2016 : 83-100.

Yusuf, M. 2010, “Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik”. Jakarta. Salemba Empat.

